BAB I

Pendahuluan

* 1. **Informasi Umum**

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan dan membantu pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat di Jakarta. Badan Penghubung berlokasi di Jalan Matraman Raya Nomor 19 (Gedung Hotel Balairung Lantai IV), Jakarta Timur -  DKI Jakarta. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menempati gedung/ kantor tersebut dengan sistem sewa kepada pihak PT. Balairung Citrajaya Sumbar selaku pengelola gedung. Luas gedung/ kantor yang ditempati adalah 416 m2 dengan sistem sewa per tahun. Dilihat dari lokasi/ letak kantor berada pada jalur strategis, maka hal ini merupakan salah satu keuntungan/ nilai tambah dalam pelaksanaan tugas serta memperlancar koordinasi dengan pihak-pihak lainnya (*stakeholders*).

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerahpada Pasal 24 ayat (7) yang menyatakan bahwa **"Untuk Menunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi Dapat Membentuk Badan Penghubung Daerah Provinsi di Ibu Kota Negara".**Sedangkan pada Pasal 70 menyatakan bahwa : **“Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Paling Banyak 3 (Tiga)Subbidang”.**

**Tugas Pokok :**

*"Membantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Jakarta"*

**Fungsi Badan Penghubung adalah:**

1. Penyelenggaraan urusan humas dan protokoler pejabat daerah di Jakarta.
2. Memfasilitasi hubungan kerja pejabat daerah dan koordinasi antar lembaga di Jakarta.
3. Penyelenggaraan promosi daerah di Jakarta.
4. Penyelenggaraan urusan keuangan, perlengkapan, dan aset kantor.
5. Melaksanakan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan dan penyusunan rencana dan program kantor.
6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
7. Pembinaan jabatan fungsional.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pada tanggal 29 Desember 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat maka Unit Pelaksana Teknis Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah diintegrasikan sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Dengan dikeluarkannya Peraturan tersebut maka per Tahun 2018 Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah bergabung dengan Badan Penghubung.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Protokol dan Pelayanan, Seksi Promosi dan Investasi.

* 1. **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2018. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

* menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
* menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
* menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
* menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
* menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
* menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

* Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017tanggal 31 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015.
* Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2017tanggal 31 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali *(trace back)* pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

* 1. **Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2018 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

* Undang-Undang Dasar Republik Indonsia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
* Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
* Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan
* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
* Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
* Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
* Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
* Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
* Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017tanggal 31 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015.
* Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2017tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.
	1. **Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2018 meliputi hal-hal berikut :

1. **PENDAHULUAN**
	1. Informasi Umum
	2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan keuangan
	3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
2. **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**
	1. Ekonomi Makro
	2. Kebijakan Keuangan
	3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
3. **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**
	1. Ikhtisar Realisasi pencapaian Target Kinerja Keuangan
	2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
4. **KEBIJAKAN AKUNTANSI**
	1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	3. Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah
5. **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**
	1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
		1. Pendapatan – LRA
		2. Belanja
	2. Penjelasan Neraca
		1. Aset
		2. Kewajiban
		3. Ekuitas Dana
	3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
		1. Pendapatan LO
		2. Beban
	4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
	5. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
6. **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**
7. **PENUTUP**

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD

**2.1 Ekonomi Makro**

Pada hakekatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan dan ditetapkan dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, APBD merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam menyejahterakan masyarakat. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu SKPD yang mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2018, bertanggung jawab dalam merealisasikan program-program dan kegiatan yang berkontribusi meningkatkan laju perekonomian dan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu yang ingin dicapai dalam tahun 2018 adalah membangun Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah guna mewujudkan Good Governance dan terciptanya pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal itu diperlukan agar terlaksana kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan berkeadilan.

Di Bidang pelayanan, yang diimplementasikan dalam tahun 2018 guna membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta adalah :

* Meningkatnya efesiensi dan efektivitas mekanisme dan prosedur pelayanan
* Meningkatnya fasilitasi bidang penghubung lingkup Propinsi dan Kabupaten/Kota
* Meningkatnya efektivitas dan efesiensi pelaksanaan tugas bidang humas protokol dan pelayanan, hubungan antar lembaga dan promosi, monitoring evaluasi dan pelaporan.
* Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas untuk tahun 2018 pada Badan PenghubungProvinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan 9(sembilan) Program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Pelayanan Publik
7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
8. Program Pengembangan Data dan Informasi
9. Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

**2.2 Kebijakan Keuangan**

Penggunaan anggaran yang tersedia dalam DPA Badan PenghubungProvinsi Sumatera Barat tahun 2018 telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Efektif sebagaimana tersebut diatas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum, pertanggung jawaban merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

**2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Penyusunan APBD Tahun 2018, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **PROGRAM** |  | **KEGIATAN** |  | **TARGET KINERJA** |
| **1.** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | Pengadaan 675 buah materai Rp. 6000,- dan 355 buah materai Rp.3000,-Terlaksananya jasa pengiriman surat selama1 tahun |
|  |  | 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | Terpenuhinya pembayaran tagihan listrik, air, telepon dan sewa VPN IP untuk SIPKD selama 12 bulan |
|  |  | 3. | Penyediaan Jasa Kebersihan,Pengamanan &Sopir Kantor | - | Tersedianya jasa kebersihan, Pengamanan &Sopir Kantor selama 1 tahun |
|  |  | 4. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | - | Tersedianya 1 IC Recorder,1 printer dan peralatan kantor |
|  |  | 5. | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | - | Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak atas asset BPHB selama 1 tahun |
|  |  | 6. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | - | Terpenuhinya kebutuhan ATK SKPD untuk 1 tahun |
|  |  | 7. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang digunakan 1 unit SKPD selama 1 tahun |
|  |  | 8. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | - | Tersedianya instalasi dan peralatan penerangan Kantor selama 1 tahun |
|  |  | 9. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | Tersedianya peralatan dan alat pembersih untuk 1 tahun |
|  |  | 10. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-undangan | - | Tersedianya bahan bacaan untuk SKPD Kantor Penghubung selama 12 bulan |
|  |  | 11. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah | - | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerahselama 1 tahun |
|  |  | 12. | Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi | - | Terlaksananya publikasi/ dokumentasi kegiatan pejabat Provinsi Sumatera Barat dan tenaga Pengelola Pemprov Sumbar TV selama 1 tahun |
|  |  | 13. | Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur | - | Terlaksananya Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur selama 1 tahun |
|  |  | 14. | Penyediaan Makanan dan Minuman | - | Tersedianya makan minum rapat dan tamu selama 1 tahun |
|  |  | 15. | Penyediaan Jasa Sewa Kantor dan Rumah Jabatan  | - | Tersedianya Jasa Sewa Kantor dan Rumah Jabatan |
|  |  |  |  |  |  |
| **2**. | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | 1. | Pengadaan Komputer dan jaringan Komputerisasi | - | Tersedianya pengadaan 3 unit laptop, 3 unit personal computer & 3 printer |
|  |  | 2. | Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi | - | Tersedianya alat studio, komunikasi dan alat informasi  |
|  |  | 3. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio,Alat Komunikasi dan Alat Informasi | - | Terpeliharanya 1 unit mesin fax, 1 unit handycam, 1 unit camera digital & 1 unit telepon |
|  |  | 4. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | - | Terlaksananya perbaikan ruangan dan taman Anjungan Sumbar TMII |
|  |  | 5. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | - | Terpeliharanya 14 kendaraan dinas operasional dan 1 motor |
|  |  | 6. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor | - | Terpeliharanya 5 mesin tik, 5 dispenser,1 mesin pemotong kertas, 2 mesin hitung dan 10 AC |
|  |  | 7. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi | - | Terpeliharanya komputer PC, laptop dan jaringan computer selama 1 tahun |
|  |  | 8. | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD | - | Terlaksananya pengelolaan dan pengawasan Aset OPD |
|  |  | 9. | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | - | Terlaksananya 2 paket rehab gedung kantor |
|  |  | 10. | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | - | Tersedianya 1 unit kendaraan operasional pada BPHB |
| **3.** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | 1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | - | Tersedianya pakaian dinasuntuk 70 orang PNS Badan Penghubung dan 7 pakaian Kerja Protokol  |
| **4.** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | 1. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | - | Terlaksananya Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan selama 1 tahun |
|  |  | 2. | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | - | Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan selama 1 tahun |
| **5.** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | 1. | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | - | Terlaksananya pembuatan RKA, DPA,DPPAdan RKT dan Renja  |
|  |  | 2. | Penatausahaan Keuangan SKPD | - | Honor Penatusaahaan keuangan dan pelaksana kegiatan serta operator SIPKD selama 1 tahun |
|  |  | 3. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan sehingga menghasilkan LAKIP, LRA,LKPJ,LPPD dan Laporan Kinerja per Triwulan Badan Penghubung selama 1 tahun |
| **6.** | **Program Peningkatan Pelayanan Publik** | 1. | Pengelola Asrama Mahasiswa Putra dan Puteri Minang di Yogyakarta dan Bogor | - | Tersedianya jasa petugas pengawas asrama untuk asrama Minang di Bogor  |
|  |  | 2. | Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan | - | Terlaksananya Pembinaan dan peningkatan peran pemuda dlm pembangunan |
| **7.** | **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan** | 1. | Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah | - | Terlaksananya pelayanan kedinasan pada Badan Penghubung selama 1 tahun |
| **8.** | **Program Pengembangan Data dan Informasi** | 1. | Pembuatan Buku Agenda Badan Penghubung Pemerintah Prov.Sumbar | - | Terlaksananya pembuatan 200 buku agenda BPHB |
| **9.** | **Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah** | 1. | Akselerasi Pengurusan Kepentingan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat | - | Terlaksananya kegiatan Akselerasi Pengurusan Manajemen Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat selama 12 bulan |
|  |  | 2. | Sumatera Barat Expo Tahun 2018 | - | Terlaksananya Sumatera Barat Expo Tahun 201 sebanyak 1 kali kegiatan di Makassar |
|  |  | 3. | Partisipasi dan Promosi Potensi Daerah pada Event Promosi di Jakarta  | - | Terlaksananya kegiatan partisipasi dan promosi potensi daerah sebanyak 3 kali kegiatan |
|  |  | 4. | Peningkatan Kualitas Kerohanian dan Ceramah Agama bagi BAKOR Masyarakat Minang | - | Terlaksananya kegiatan ceramah agama sebanyak 3 kali setahun |
|  |  | 5. | Dialog Interaktif Pejabat Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Tokoh Masyarakat Minang di perantauan melalui media | - | Terlaksananya kegiatan dialog interaktif sebanyak 3 kali dialog interaktif ( kali dialog TV dan radio) |
|  |  | 6. | Sosialisasi Pembangunan Sumatera Barat kepada Tokoh Masyarakat Minang | - | Terlaksananya 1 kali kegiatanSosialisasi Pembangunan untuk 150 orang |
|  |  | 7. | Peningkatan Kualitas Promosi Anjungan Sumatera Barat TMII | - | Tersedianya Bahan Promosi di Anjungan Sumbar TMII |
|  |  | 8. | Penampilan Anjungan Sumatera Barat pada Even TMII  | - | Terlaksananya partisipasi Anjungan Sumatera Barat pada acara ekonomi kreatif BP-TMII |
|  |  | 9. | Pagelaran Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota/BAKO IKM di Anjungan | - | Terlaksananya dukungan pagelaran dan pameran Bakor/IKM di Anjungan Sumbar TMII |
|  |  | 10. | Pagelaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Anjungan Sumatera Barat TMII | - | Terlaksananya paket khusus pagelaran pariwisata ekraf di ASB TMII |

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Dalam tahun anggaran 2018, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran Pendapatan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar **Rp 204.700.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp.238.380.000,-** atau sekitar **116.45 %**dan Belanja sebesar **Rp. 14.044.754.437,28**  realisasi sebesar **Rp.12.724.150.608,-** jumlah tersebut mencapai **90.60%** dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | Rp | **238.380.000** |
| 2 | Belanja Pegawai | Rp | **3.381.006.842** |
| 3 | Belanja Barang & Jasa | Rp | **8.766.278.881** |
| 4 | Belanja Modal | Rp | **576.864.885** |
|   | Jumlah | Rp | **12.724.150.608** |

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Badan PenghubungProvinsi Sumatera Barat sebesar **Rp.12.724.150.608**,- atau dalam bentuk persentase sebanyak **90.60%.**

Untuk Belanja Pegawai, Badan Penghubungmempunyai anggaran sebesar**Rp.3.626.560.739,28**telah direalisasikan sebesar **Rp.3.381.006.842**,-atau dalam bentuk persentase sebanyak **93.23%.**

Untuk Belanja Barang dan Jasa, Badan Penghubungmempunyai anggaran sebesar**Rp.9.807.826.198**,- telah direalisasikan sebesar **Rp.8.766.278.881**,- atau dalam bentuk persentase sebanyak**89,38%.**

Untuk Belanja Modal, Badan Penghubungmempunyai anggaran sebesar**Rp. 610.367.500**,- telah direalisasikan sebesar **Rp. 576.864.885**,- atau dalam bentuk persentase sebanyak**94.51%.**

**3.2 Belanja Daerah**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi pendapatan, belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Anggaran** | **Realisasi** | **%** | **Lebih/Kurang** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Pendapatan Asli Daerah**  | **204.700.000** | **238.380.000** | **116.45%** | **33.680.000** |
|  | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 204.700.000 | 238.380.000 | 116.45% | 33.680.000 |
|   | **Belanja** |  **14.044.754.437,28**  |  **12.724.150.608**  | **90,60%** |  **1.320.603.829**  |
| I | Belanja Operasi | 13.434.386.937,28 |  7.585.039.050  | 91,23% |  729.336.298  |
| 1 | Belanja Pegawai |  3.214.374.460  |  3.180.723.418  | 98,95% |  33.651.042  |
| 2 | Belanja Barang Jasa |  5.100.000.888  |  4.404.315.632  | 86,36% |  695.685.256  |
|  |  |  |  |  |  |
| II | Belanja Modal |  610.367.500,00  |  576.864.885,00  | 94,51% |  33.502.615  |
| 1 | Belanja Tanah |  -  |  -  |  |  |
| 2 | Belanja Peralatan Mesin |  379.400.000,00  |  358.550.000,00  | 94,50% |  20.850.000  |
| 3 | Belanja Gedung& Bangunan |  226.967.500,00  |  218.314.885,00  | 96,19% |  8.652.615  |
| 4 | Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan  |  -  |  -  | 0,00% |  -  |
| 5 | Belanja Aset Tetap Lainnya  |  4.000.000,00  |  -  | 0,00% |  4.000.000  |

*(dalam satuan rupiah)*

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**.

Untuk program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 15 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 4.003.547.998**,- terealisasi sebesar **Rp. 3.534.991.365,**- dalam bentuk persentase sebanyak **88.30%** dengan kegiatan sebagai berikut :

* 1. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mempunyai anggaran sebesar **Rp. 24.129.000**,- realisasinya sebesar **Rp. 8.432.328**,- dengan persentase **34.95%** dan mempunyai sisa sebesarRp. 15.696.672,-.

* 1. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

 Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mempunyai anggaran sebesar **Rp.393.680.000,-** realisasinya sebesar**Rp. 283.416.160,-** dengan persentase **71.99%** dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 110.263.840,-.

* 1. **Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan & Sopir Kantor**

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan & Sopir Kantor mempunyai anggaran sebesar **Rp.877.327.630**,- realisasinya sebesar **Rp.842.276.429**,- dengan persentase **96.00%.**

* 1. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Untuk kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai anggaran sebesar **Rp. 40.240.000,-** realisasinya sebesar **Rp.6.863.300,-** atau sebesar **17.06%**

* 1. **Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah**

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. **165.650.000**,- realisasinya sebesar **Rp.119.488.899**,- dengan persentase**72.13%**.

* 1. **Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Untuk kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor mempunyai anggaran sebesar **Rp. 76.911.520**,- realisasinya sebesar **Rp. 76.759.151**,- dengan persentase **99.80%** yang mana anggaran tersebut direalisasikan sesuai kebutuhan.

* 1. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan mempunyai anggaran sebesar**Rp**. **46.216.250**,- realisasinya sebesar **Rp. 46.177.100,-** dengan persentase**99.92%.**

* 1. **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Untuk kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mempunyai anggaran sebesar**Rp**. **10.797.978**,- realisasinya sebesar **Rp. 2.497.775-** dengan persentase**23.13%.**

* 1. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari Belanja Surat Kabar/Majalah mempunyai anggaran sebesar **Rp. 22.720.000,-** realisasinya sebesar **Rp.7.171.000,-** dengan persentase**31.56%**.

* 1. **Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah**

Untuk kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah mempunyai anggaran sebesar **Rp.740.307.870**- realisasinya sebesar **Rp.664.045.951**,- dengan persentase **89.70%** dan mempunyai sisa anggaran sebesar **Rp. 76.261.919**,- yang mana sisa tersebut yang terbanyak merupakan sisa dari belanja perjalanan dinas luar daerah.

* 1. **Penyediaan Jasa Informasi,Dokumentasi dan Publikasi**

Untuk kegiatan Jasa Informasi,Dokumentasi dan Publikasi mempunyai anggaran sebesar **Rp. 153.569.750,-** realisasinya sebesar **Rp 110.642.303,-** dengan persentase **72.05%** dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 42.927.447,-.

* 1. **Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik Mental Aparatur**

Untuk kegiatanPenyediaan Jasa Pembinaan Fisik Mental Apratur mempunyai anggaran sebesar **Rp. 18.600.000,-** realisasinya sebesar **Rp 0,-** dengan persentase **0.0%** dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.**18.600.000,-**

* 1. **Penyediaan Makanan dan Minuman**

Untuk kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman mempunyai anggaran **Rp.79.000.000**,- realisasinya sebesar **Rp. 50.249.794**,- dengan persentase **63.61%** dan mempunyai sisa anggaran sebesar 28.750.206,- yang mana realisasinya sesuai dengan kebutuhanmakanan dan minuman Badan Penghubung tahun 2018.

* 1. **Penyediaan Jasa Sewa Kantor dan Rumah Jabatan**

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Kantor dan Rumah Jabatan memiliki anggaran **Rp. 1.326.218.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.1.313.218.000** atau sekitar **99.04%.**

1. **Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur**

Untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mempunyai 7 (tujuh) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 1.010.757.500**,- terealisasi sebesar **Rp.889.407.785**,- dalam bentuk persentase sebanyak**87.99%** dengan kegiatan sebagai berikut :

1. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi**

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi, dan Informasi mempunyai anggaran sebesar **Rp. 4.200.000**,- realisasinya sebesar **Rp. 1.150.000**,- dengan persentase **27.38**% direalisasikan sesuai dengan kebutuhanpemeliharaan peralatan studio dan komunikasi yang ada.

1. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional mempunyai anggaran sebesar **Rp. 219.500.000**,- realisasinya sebesar **Rp. 190.333.900**,- dengan persentase **86,71%**.

1. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor**

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantormempunyai anggaran sebesar **Rp. 40.240.000**,- realisasinya sebesar **Rp.6.600.000,-**dengan persentase **16.40%**direalisasikan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor yang ada.

1. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi**

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi mempunyai anggaran sebesar**Rp. 31.150.000**,- realisasinya sebesar **Rp.19.630.000**,- dengan persentase**63.02%** yang mana dana tersebut dialokasikan sesuai kebutuhanservice komputer dan jaringan komputerisasi Badan Penghubung.

1. **Pengelolaan,Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD**

KegiatanPengelolaan,Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD memiliki anggaran Perubahan sebesar **Rp.62.300.00.,-** dengan realisasi sebesar **Rp 48.500.000,-**atau sebesar **77.85%.**

1. **Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor**

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor memiliki anggaran Perubahan sebesar Rp.**226.967.500,-** dengan realisasi sebesar**Rp.218.314.885** atau sebesar**96,19%**

1. **Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**

KegiatanPengadaanKendaraanDinas/Operasional mempunyai anggaran Perubahan sebesar **Rp.262.400.000,**- dengan realisasi sebesar **Rp.246.870.00,**- atau sebesar **94.08%.**

1. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Untuk program Peningkatan Disiplin Aparatur mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp**. **52.360.000**,- terealisasi sebesar **Rp. 52.344.000**,- dalam bentuk persentase sebanyak **99.97**% dengan kegiatan sebagai berikut :

1. **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**

Untuk Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya mempunyai anggaran sebesar **Rp**. **52.360.000**,- terealisasi sebesar **Rp. 52.344.000**,- dalam bentuk persentase sebanyak **99.97% .**

1. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Untuk program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mempunyai 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp 78.406.000**,- terealisasi sebesar **Rp. 65.733.328**,- dalam bentuk persentase sebanyak **83.84**% dengan kegiatan sebagai berikut :

1. **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**

Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai anggaran perubahan sebesar **Rp 64.248.000**,- terealisasi sebesar **Rp. 61.158.743**,- dalam bentuk persentase sebanyak **89.07%** .

1. **Sosialisasi Peraturan danPerundang-Undangan**

Untuk Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai anggaran perubahan sebesar **Rp 9.742.000,**,- terealisasi sebesar **Rp. 4.574.585**,- dalam bentuk persentase sebanyak **46.96%** .

1. **Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Untuk program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp.126.835.088**,- terealisasi sebesar **Rp. 106.906.550**,- dalam bentuk persentase sebesar **84,29**% dengan kegiatan sebagai berikut :

1. **Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD**

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan anggaran **Rp.10.523.088**dan terealisasi sebesar **Rp.1.456.550,-** atau sebesar **13.84%.**

1. **Penatausahaan Keuangan SKPD**

Untuk Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai anggaran sebesar **Rp. 104.400.000,-** realisasinya sebesar **Rp.94.650.000**,- dengan persentase **90.66**%.

1. **Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai anggaran sebesar **Rp. 11.912.000**,- realisasinya sebesar **Rp.10.800.000,-**dengan persentase **90.66%** dan mempunyai sisa anggaran sebesar **Rp.1.112.000**,-.Sisa anggaran mayoritas terletak pada belanja makan minum rapat.

1. **Program Peningkatan Pelayanan Publik**

Untuk Program ini memmiliki anggaran perubahan sebesar **Rp.252.324.600,-** dengan realisasi sebesar **Rp.245.281.450,-** atau sekitar **97.21%**. Dalam Program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu:

* 1. **Pengelolaan Asrama Mahasiswa Putra & Putri Minang Yogyakarta & Bogor**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar **Rp.253.204.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.238.427.769** atau sekitar **94.16%.**

* 1. **Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar **Rp.60.000.000,00**dan realisasi sebesar **Rp.59.944.598**atau sebesar**99.01%**

1. **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan**

Untuk program Peningkatan Pelayanan Kedinasan mempunyai 1 (satu) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 1.135.120.300**,- terealisasi sebesar **Rp. 974.627.441,-** dalam bentuk persentase sebanyak **85.86%** dengan kegiatan sebagai berikut :

1. **Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah**

Untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah mempunyai anggaran sebesar **Rp. 1.135.120.300**,- terealisasi sebesar **Rp. 974.627.441,-** dalam bentuk persentase sebanyak **85.86%.**

1. **Program Pengembangan Data dan Informasi**
	1. **Pembuatan Buku Agenda Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

Kegiatan ini memiliki anggaran Perubahan sebesar **Rp.37.880.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.24.359.700,-** atau sebesar **64.31%.**

1. **Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah**

Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah memiliki anggaran Perubahan sebesar **Rp**. **3.720.962.212,-**dengan realisasi **Rp 3.449.492.147,-** atau sebesar **92,70%**. Program ini dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :

* 1. **Akselerasi Pengurusan Kepentingan ke Pemerintah Pusat**

Kegiatan ini memiliki anggaran Perubahan sebesar **Rp 90.700.000**,- dengan realisasi sebesar **Rp59.157.237,-** atau dalam bentuk persentase sebesar **65,22%**.

* 1. **Sumatera Barat Expo Tahun 2018**

Kegiatan ini memiliki anggaran Perubahan sebesar **Rp 719.752.400,-** dengan realisasi sebesar **Rp 615.736.076,-**atau sekitar **85.55%.**

* 1. **Partisipasi dan Promosi Potensi Daerah Pada Event Promosi**

Kegiatan ini memiliki anggaran Perubahan sebesar **Rp 1.869.492.112-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.1.820.271.092**,- atau sekitar **97.37%.**

* 1. **Peningkatan Kualitas Kerohanian dan Ceramah Agama Bagi BAKOR Masyarakat Minang**

Kegiatan ini memiliki anggaran Perubahan sebesar **Rp 109.527.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp 107.325.072,-** atau sebesar **97.99%.**

* 1. **Dialog Interaktif Pejabat Provinsi, Kabupaten /Kota Dengan Tokoh Masyarakat Minang di Perantauan Melalui Media**

Kegiatan ini memiliki anggaran Perubahan sebesar **Rp 80.000.000,-** dan realisasi sebesar **Rp.75.197.257**atau sebesar **94.00%.**

* 1. **Sosialisasi Program Pembangunan Sumatera Barat kepada Tokoh Masyarakat Minang Jabodetabek**

Kegiatan ini memiliki anggaran Perubahan sebesar **Rp.63.474.200**,- dengan realisasi sebesar **Rp.62.913.554,-** atau sekitar **99.12%**.

* 1. **Peningkatan KualitasPromosi AnjunganSumatera Barat TMII**

Kegiatan ini memiliki anggaran Perubahan sebesar Rp.**145.814.500,**dengan realisasi sebesar**Rp.111.400.000**atau sebesar **76.40%**.

* 1. **Penampilan AnjunganSumatera Barat pada EvenTMII**

Kegiatan ini memiliki anggaran Perubahan sebesar Rp.**145.814.500,** dengan realisasi sebesar **Rp.111.400.000** atau sebesar **96.45%**.

* 1. **Pagelaran Ekonomi KreatifKabupaten/Kota/BAKO IKMdi Anjungan**

Kegiatan ini memiliki anggaran Perubahan sebesar Rp.**100.000.000,,** dengan realisasi sebesar **Rp.85.039.494**atau sebesar **85.04%.**

* 1. **Pagelaran Pariwisata danEkonomi Kreatif diAnjungan Sumatera BaratTMII**

Kegiatan ini memiliki anggaran Perubahan sebesar Rp**202.244.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.184.576.577,-** atau sebesar**91.26%.**

**3.3 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti, terdapat beberapa kegiatan yang tingkat pencapaiannya dibawah 90 % yaitu :

1. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mempunyai anggaran sebesar **Rp. 24.129.000**,- realisasinya sebesar **Rp. 8.432.328**,- dengan persentase **34.95%** dan mempunyai sisa sebesarRp. 15.696.672,-. Rendahnya realisasi pada kegiatan ini disebabkan pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan operasional Kantor akan jasa Pengiriman surat dan paket dinas Tahun 2018.

1. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

 Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mempunyai anggaran sebesar **Rp.393.680.000,-** realisasinya sebesar**Rp. 283.416.160,-** dengan persentase **71.99%** dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 110.263.840,-. Rendahnya pencapaian realisasi pada kegiatan ini disebabkan pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan operasional Kantor terhadap tagihan listrik, telepon, internet dan VPN IP Tahun 2018

1. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Untuk kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai anggaran sebesar **Rp. 40.240.000,-** realisasinya sebesar **Rp.6.863.300,-** atau sebesar **17.06%.** Rendahnya realisasi disebabkan pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan lebih mengutamakan pada kebutuhan yang prioritas pada Anjungan Sumbar TMII.

1. **Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah**

Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. **165.650.000**,- realisasinya sebesar **Rp.119.488.899**,- dengan persentase**72.13%**. Rendahnya pencapaian kegiatan ini disebabkan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan PBB dan Premi Asuransi Barang Milik Daerah pada 3 bangunan Asrama Mahasiswa dan 11 Kendaraan Dinas Operasional Badan Penghubung.

1. **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Untuk kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mempunyai anggaran sebesar**Rp**. **10.797.978**,- realisasinya sebesar **Rp. 2.497.775-** dengan persentase**23.13%.**Rendahnya realisasidisebabkan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan Operasional Kantor karena sebagian kebutuhan rumah tangga Kantor di cover/telah disediakan oleh PT.Balairung sebagai Penyedia Sewa Gedung Kantor dalam Kontrak sewa Gedung Kantor.

1. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari Belanja Surat Kabar/Majalah mempunyai anggaran sebesar **Rp. 22.720.000,-** realisasinya sebesar **Rp.7.171.000,-** dengan persentase**31.56%**. Rendahnya realisasi disebabkan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan per Undang-Undangan pada Badan Penghubung Sumbar dan Anjungan Sumbar TMII.

1. **Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah**

Untuk kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah mempunyai anggaran sebesar **Rp.740.307.870**- realisasinya sebesar **Rp.664.045.951**,- dengan persentase **89.70%** dan mempunyai sisa anggaran sebesar **Rp. 76.261.919**,- yang mana sisa tersebut yang terbanyak merupakan sisa dari belanja perjalanan dinas luar daerah.

1. **Penyediaan Jasa Informasi,Dokumentasi dan Publikasi**

Untuk kegiatan Jasa Informasi,Dokumentasi dan Publikasi mempunyai anggaran sebesar **Rp. 153.569.750,-** realisasinya sebesar **Rp 110.642.303,-** dengan persentase **72.05%** dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 42.927.447,-. Rendahnya realisasi pada kegiatan ini disebabkan pelaksanaan kegiatan dokumentasi disesuaikan dengan kedatangan dan kegiatan Pimpinan Daerah ( Gubernur dan Wakil Gubernur ) ke Luar Daerah pada Tahun 2018.

1. **Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik Mental Aparatur**

Kegiatan dengan dana Rp 18.600.000,- ini tidak direalisasikan pada tahun 2018. Hal ini disebabkan Kegiatan Pembinaan Fisik Mental Aparatur dialokasikan untuk penunjang kegiatan olah raga dan ceramah agama dengan seluruh Badan Penghubung se Indonesia, tapi sampai akhir tahun Badan Penghubung Prov.Sumbar belum mendapat giliran untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan

1. **Penyediaan Makanan dan Minuman**

Untuk kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman mempunyai anggaran **Rp.79.000.000**,- realisasinya sebesar **Rp. 50.249.794**,- dengan persentase **63.61%** dan mempunyai sisa anggaran sebesar 28.750.206,- yang mana realisasinya sesuai dengan kebutuhanmakanan dan minuman rapat dan kedatangan tamu Badan Penghubung tahun 2018.

1. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi**

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi, dan Informasi mempunyai anggaran sebesar **Rp. 4.200.000**,- realisasinya sebesar **Rp. 1.150.000**,- dengan persentase **27.38**% direalisasikan sesuai dengan kebutuhanpemeliharaan peralatan studio dan komunikasi yang ada.

1. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional mempunyai anggaran sebesar **Rp. 219.500.000**,- realisasinya sebesar **Rp. 190.333.900**,- dengan persentase **86,71%**. Realisasi kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan kendaraan operasional Badan Penghubung Tahun 2018.

1. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor**

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantormempunyai anggaran sebesar **Rp. 40.240.000**,- realisasinya sebesar **Rp.6.600.000,-**dengan persentase **16.40%**direalisasikan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor yang ada.

1. **Pemeliharan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi**

Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi mempunyai anggaran sebesar**Rp. 31.150.000**,- realisasinya sebesar **Rp.19.630.000**,- dengan persentase**63.02%** yang mana dana tersebut dialokasikan sesuai kebutuhanservice komputer dan jaringan komputerisasi Badan Penghubung.

1. **Pengelolaan,Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD**

KegiatanPengelolaan,Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD memiliki anggaran Perubahan sebesar **Rp.62.300.00.,-** dengan realisasi sebesar **Rp 48.500.000,-**atau sebesar **77.85%.**Kegiatan ini direalisasikan sesuai kebutuhan SKPD.

1. **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**

Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai anggaran perubahan sebesar **Rp 64.248.000**,- terealisasi sebesar **Rp. 61.158.743**,- dalam bentuk persentase sebanyak **89.07%** . Kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan undangan Bimbingan Teknis yang diperoleh Badan Penghubung pada Tahun 2018.

1. **Sosialisasi Peraturan danPerundang-Undangan**

Untuk Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai anggaran perubahan sebesar **Rp 9.742.000,**,- terealisasi sebesar **Rp. 4.574.585**,- dalam bentuk persentase sebanyak **46.96%** . Rendahnya realisasi pada kegiatan ini disebabkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Undangan Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan yang ada untuk peningkatan SDM Aparatur pada Badan Penghubung Prov.Sumbar. Sisa anggaran terdapat pada Biaya Perjalanan Dinas disebabkan efisiensi perjalanan dinas karena terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya bersamaan dengan acara/ kegiatan lain dan pertanggungjawabannya masuk ke Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah.

1. **Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD**

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan anggaran **Rp.10.523.088**dan terealisasi sebesar **Rp.1.456.550,-** atau sebesar **13.84%.**Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan pembuatan RKA,DPA,DPPA,RKT dan Renja APBD pada Badan Penghubung Prov.Sumatera Barat Tahun 2018.

1. **Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah**

Untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah mempunyai anggaran sebesar **Rp. 1.135.120.300**,- terealisasi sebesar **Rp. 974.627.441,-** dalam bentuk persentase sebanyak **85.86%.**Realisasi Kegiatan ini disesuaikan dengan kegiatan dan kedatangan Pimpinan Daerah yang membutuhkan pelayanan Badan Penghubung tahun 2018.

1. **Pembuatan Buku Agenda Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

Kegiatan ini memiliki anggaran Perubahan sebesar **Rp.37.880.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.24.359.700,-** atau sebesar **64.31%.**Rendahnya pencapaian realisasi kegiatan inidisebabkan karena dari hasil evaluasi bersama bahwa Buku Agenda TA 2019 dari segi ukuran (ketebalan,panjang dan lebarnya dikurangi) karena dibandingkan dengan buku agenda 2018 terlalu besar dan agak susah dibawa. Sehingga dari segi biaya juga berkurang namun kualitas tetap bagus.

1. **Akselerasi Pengurusan Kepentingan ke Pemerintah Pusat**

Kegiatan ini memiliki anggaran Perubahan sebesar **Rp 90.700.000**,- dengan realisasi sebesar **Rp59.157.237,-** atau dalam bentuk persentase sebesar **65,22%**. Kegiatan ini dilaksanakan apabila ada undangan untuk memfasilitasi pejabat Pemerintah Prov.Sumatera Barat ke Pemerintah Pusat. Selain itu jugadisebabkan ada Kegiatan yang tidak bisa terlaksana pada Tahun 2018 yaitu menghadiri Kegiatan APPSI di Kalimantan sehubungan waktunya bertepatan dengan Kegiatan lain yang diadakan oleh Provinsi Sumbar di Padang. Selain itu terdapat juga beberapa kegiatan perjalanan Dinas Luar Daerah yang pelaksanaanya bersamaan dengan Acara/Kegiatan lain dan pertanggungjawabannya masuk ke Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah sehingga efisiensi perjalanan dinas luar daerah dapat dilakukan.

1. **Sumatera Barat Expo Tahun 2018**

Kegiatan ini memiliki anggaran Perubahan sebesar **Rp 719.752.400,-** dengan realisasi sebesar **Rp 615.736.076,-**atau sekitar **85.55%.**Realisasi kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan Kegiatan Sumatera Barat Expo Tahun 2018 di Makassar.

1. **Peningkatan KualitasPromosi AnjunganSumatera Barat TMII**

Kegiatan ini memiliki anggaran Perubahan sebesar Rp.**145.814.500,**dengan realisasi sebesar**Rp.111.400.000**atau sebesar **76.40%**. Realisasi pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

1. **Pagelaran Ekonomi KreatifKabupaten/Kota/BAKO IKMdi Anjungan**

Kegiatan ini memiliki anggaran Perubahan sebesar Rp.**100.000.000,,** dengan realisasi sebesar **Rp.85.039.494**atau sebesar **85.04%.**Realisasi pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2018, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan dan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubenur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2014 serta Pergub No 43 tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014.

**4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2018 adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran / barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

**4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang , termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yangs seharusnya.

Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat : a) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau b) Diterima oleh SKPD; atau c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

* 1. **Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

**1. Pengukuran/ Penilaian Aset**

1. **Kas**

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah , Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya, dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

1. **Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

1. **Piutang**

Piutang diakui saat: a) Diterbitkan surat ketetapan; atau b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang dicatat dan diukur sebesar: a) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau b) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan**.**

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*).

1. **Persediaan disajikan sebesar :**
	* Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
	* Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
2. **Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah mapun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran porsentase kepemilikkan (saham ) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika porsentase kepemilikkan melebihi 20% dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.

1. **Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

1. **Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak lansung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut . Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

1. **Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

1. **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

1. **Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

1. **Kontruksi Dalam Pengerjaan**

**Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.**

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

* Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari danke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
* Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

* Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
* Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi**.**

**l. Penyusutan Aset Tetap**

* Mulai Tahun 2015 penyusutan telah dilakukan terhadap aset tetap berupa : Gedung dan Bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya
* Nilai yang dapat disusutkan adalah :
	+ - Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.
		- Nilai buku merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan
		- Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan
		- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat**.**

**2. Pengukuran/ Penilaian Kewajiban**

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas: a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK); b) Pendapatan Diterima Dimuka; c) Utang Beban; dan d) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban diakui pada saat:

a) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau

b) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau

c) Pada saat kewajiban timbul.

1. **Pengukuran/ Penilaian Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

1. **Pengukuran/ Penilaian Pendapatan-LRA**

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat:

a) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau

b) Diterima oleh SKPD; atau

c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

1. **Pengukuran/ Penilaian Belanja**

1.Pengakuan Belanja

a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

2. Pengukuran belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

1. **Pengukuran/ Penilaian Pendapatan-LO**

Pengukuran Pendapatan-LO :

a) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar

b) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

1. **Pengukuran/ Penilaian Beban**

**Pengakuan Beban Pada SKPD :**

**(1) Beban Pegawai**

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran

**(2) Beban Barang**

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

* 1. **Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 maka tahun 2015 telah dilakukan penyusutan aset tetap pertama kali sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur No.05 Tahun 2015 tanggal 24 Januari 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

BAB V

Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan

**5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

**5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** |  **Anggaran 2018 (Rp)**  |  **Realisasi 2018 (Rp)**  |  **%**  |  **Realisasi 2017 (Rp)**  |
|   | **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah** | **204.700.000** | **238.380.000** |  -  | **-**  |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Asli DaerahTahun 2018 dan 2017. Pada tahun 2017 tidak terdapat Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

**5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja**

 **1. Belanja Operasi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** |  **Anggaran 2018 (Rp)**  |  **Realisasi 2018 (Rp)**  |  **%**  |  **Realisasi 2017 (Rp)**  |
|  | **Belanja Operasi** | **13.434.386.937,28** | **12.147.285.723,-** | **90.42** | **7.585.039.050,-** |

* 1. **Belanja Pegawai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** |  **Anggaran 2018 (Rp)**  |  **Realisasi 2018 (Rp)**  |  **%**  |  **Realisasi 2017 (Rp)**  |
|  | **Belanja Pegawai** | **3.626.560.739,28** | **3.381.006.842,-** | **93.23** | **3.180.723.418,-** |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 dan 2017. Untuk realisasi Tahun 2018 mencapai**93.23%** dari anggarannya. Sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp.245.553.897,28,- adalah Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.93.055.570,28,- dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.146.357.327,-. tidak terealisasi karena pembayaran sesuai kebutuhan dan ada PNS yang pensiun..

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 terdapat kenaikan realisasi sebesar**Rp.200.283.424**,-. Belanja Pegawai ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung berupa Gaji dan Tunjangan dan tambahan penghasilan PNS yang terdiri dari:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** |  **Anggaran 2018 (Rp)**  |  **Realisasi 2018 (Rp)**  |  **%**  |  **Realisasi 2017 (Rp)**  |
| - | Gaji dan Tunjangan | 2.047.137.617,28 | 1.954.082.047,- | 95.45 | 1.935.748.919,- |
| - | Tambahan Penghasilan PNS | 1.573.282.122,- | 1.426.924.795,- | 90,70 | 1.244.974.499,- |
| - | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 6.141.000,- | **-** | **-** | **-** |
|  | Jumlah | **3.626.560.739,28,-** | **3.381.006.842,-** | **93.23** | **3.180.723.418,-** |

 Pada Tahun 2018 tidak terdapat pengembalianbelanja tidak langsung atau contrapost (CP) sehingga angka realisasi mencerminkan angka netto Belanja Tidak Langsung Pegawai.

* 1. **Belanja Barang & Jasa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** |  **Anggaran 2018 (Rp)**  |  **Realisasi 2018 (Rp)**  |  **%**  |  **Realisasi 2017 (Rp)**  |
|  | **Belanja Barang & Jasa** | **9.807.826.198,-** | **8.766.278.881,-** | **89,38** | **4.404.315.632,-** |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang& JasaTahun Anggaran 2018 dan 2017. Untuk realisasi Tahun 2018mencapai **89.38 %** dari anggarannya. Sisa Belanja Barang dan Jasa sejumlah **Rp.1.041.547.317** adalah Belanja seluruh kompenen dari belanja barang dan jasa yang merupakan efisiensi dari pelaksanaan anggaran.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 terdapat kenaikan sebesar Rp.4.361.963.249,-karena terdapat penambahan Anggaran Belanja dari penggabungan Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah.Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** |  **Anggaran 2018 (Rp)**  |  **Realisasi 2018 (Rp)**  |  **%**  |  **Realisasi 2017 (Rp)**  |
| - | Belanja Bahan Pakai Habis | 408.114.548 | 280.138.688 | 68,64% | 170.617.061 |
| - | Belanja Jasa Kantor | 615.650.000 | 453.304.224 | 73,63% | 316.688.212 |
| - | Belanja Premi Asuransi | 134.150.000 | 112.246.835 | 83,67% | 72.118.643 |
| - | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 219.500.000 | 190.333.900 | 86,71% | 147.496.656 |
| - | Belanja Cetak dan Penggandaan | 154.870.238 | 132.358.650 | 85,46% | 93.595.500 |
| - | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir | 1.477.043.712 | 1.426.851.775 | 96,60% | 158.535.200 |
| - | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 136.750.000 | 120.800.000 | 88,34% | 58.200.000 |
| - | Belanja Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor/Rumah | 91.050.000 | 91.050.000 | 100,00% | 3.000.000 |
| - | Belanja Makanan dan Minuman | 596.829.895 | 523.502.434 | 87,71% | 280.174.630 |
| - | Belanja Pakaian Dinas & Atributnya | 47.600.000 | 47.586.000 | 99,97% | 20.340.000 |
| - | Belanja Pakaian Kerja | 17.680.000 | 17.674.000 | 99,97% | 16.320.000 |
| - | Belanja Pakaian Khusus dan Hari Hari tertentu | 50.000.000 | 49.940.000 | 99,88% | 38.500.000 |
| - | Belanja Perjalanan Dinas | 2.431.511.070 | 2.082.511.327 | 85,65% | 2.078.892.637 |
| - | Belanja Pemeliharaan | 125.590.000 | 76.709.000 | 61,08% | 111.101.570 |
| - | Honorarium PNS | 179.400.000 | 159.950.000 | 89,16% | 123.650.000 |
| - | Honorarium Non PNS | 909.907.670 | 831.009.238 | 91,33% | 596.428.723 |
| - | Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00% | - |
| - | Belanja Jasa Lembaga | 240.000.000 | 239.550.000 | 99,81% | 118.656.800 |
| - | Belanja Jasa Lainnya | 1.952.179.065 | 1.910.762.810 | 97,88% | - |
|  | ***Jumlah...........*** | ***9.807.826.198*** | ***8.766.278.881*** | 89,38% | ***4.404.315.632*** |

Saldo/jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto, selama tahun 2018 terdapat pengembalian belanja barang dan jasa (contrapost belanja) sebesar **Rp.5.415.243,-**. Dari realisasi belanja barang ini, tidak ada yang dikapitalisir menjadi Aset Tetap dan Aset Lainnya sesuai dengan lampiran 23 pada Laporan Keuangan ini.

1. **Belanja Modal**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** |  **Anggaran 2018 (Rp)**  |  **Realisasi 2018 (Rp)**  |  **%**  |  **Realisasi 2017 (Rp)**  |
|   | **Belanja Modal**  | **610.367.065,-** | **576.864.885,-** | **94,51%** | **408.400.000,-** |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2018 dan 2017. Realisasi tahun 2018 mencapai 94,51% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar Rp.168.464.885 ,-.Belanja Modal tahun 2018terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Rincian dari belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

1. **Belanja Modal Peralatan & Mesin**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** |  **Anggaran 2018 (Rp)**  |  **Realisasi 2018 (Rp)**  |  **%**  |  **Realisasi 2017 (Rp)**  |
|   | **Belanja Modal Peralatan & Mesin** | **379.400.000,-** | **358.550.000,-** | **94.50%** | **408.400.000,-** |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2018 dan 2017. Realisasi tahun 2018 mencapai 94,51% dari anggarannya. Sisa Belanja Modal sejumlah 33.502.180,- adalah efisiensi anggaran serta tidak terealisasinya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya .

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** |  **Anggaran 2018 (Rp)**  |  **Realisasi 2018 (Rp)**  |  **%**  |  **Realisasi 2017 (Rp)**  |
| - | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan darat Bermotor | 262.400.000,- | 246.870.000,- | 94.08 | 382.400.000,- |
| - | Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer | 117.000.000,- | 111.680.000,- | 95,45 | 26.000.000,- |
|   | **Jumlah** | **379.400.000,-** | **358.550.000,-** | **94.50** | **408.400.000** |

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ini, semua dikapitalisir menjadi asset karena harga perolehan per unitnya mencapai Rp 1.000.000,-.

1. **Belanja Modal Gedung & Bangunan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** |  **Anggaran 2018 (Rp)**  |  **Realisasi 2018 (Rp)**  |  **%**  |  **Realisasi 2017 (Rp)**  |
|  | **Belanja Modal Gedung & Bangunan** | **226.967.500,-** | **218.314.885,-** | **96.19%** | **-** |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2018 dan 2017. Realisasi tahun 2018 mencapai 96,19% dari anggarannya. Sisa Belanja Modal adalah berupa efisiensi anggaran.

Adapun rincian objek belanja modal gedung dan bangunan adalah:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** |  **Anggaran 2018 (Rp)**  |  **Realisasi 2018 (Rp)**  |  **%**  |  **Realisasi 2017 (Rp)**  |
| - | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor  | 226.967.500,- | 218.314.885,- | 96.19 | - |
|  | **Jumlah** | **226.967.500,-** | **218.314.885,-** | **96.19** | **-** |

1. **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** |  **Anggaran 2018 (Rp)**  |  **Realisasi 2018 (Rp)**  |  **%**  |  **Realisasi 2017 (Rp)**  |
|  | **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** | **4.000.000,-** | **-** | **-** | **-** |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja asset tetap lainnya tahun 2018 dan 2017. Pada tahun 2018tidak ada realisasinya.

Daftar Belanja Modal Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 21 dan Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada Lampiran 22.

* 1. **Penjelasan Pos Pos Neraca**

5.2.1. Aset

 Aset Lancar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2018 (Rp)**  | **2017(Audited) (Rp)** |
| **1**. | **Kas di Bendahara Pengeluaran**  | **-** | **-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018dan 2017. Sampai dengan 31 Desember 2018, sisa UYHD sebesar **Rp.867.476,00**,- telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2018. Semua pengembalian belanja danpajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2018.

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1 Laporan Keuangan ini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2018 (Rp)**  | **2017 (Audited) (Rp)** |
| **2.** | **Persediaan** | **55.633.145,-** | **9.266.800,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017, yaitu terdiri dari:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Uraian** |  **Jumlah**  |
| **1** | **Persediaan Bahan Pakai Habis** | **55.633.145,-** |
| - | Alat Tulis Kantor | 22.929.586,- |
| - | Alat Listrik dan Elektronik | 149.927,- |
| **-** | Bahan Pakai Habis Lainnya | 7.481.412,- |
| **-** | Bahan Dokumentasi/Cetakan | 25.072.220,- |
|  | **Total** | **55.633.145,-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Bahan Pakai Habis | 9.266.800,- |  47.361.719,- |  995.374,- |  55.633.145,- |

Penambahan adalah penyesuaian persediaan per 31 Desember 2018 berdasarkan stock opname.

Pengurangan adalah penyesuaian persediaan tahun 2018 berdasarkan stock opname semester I dan Semester II 2018.

Selengkapnya untuk penjelasan Persediaan dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2018 (Rp)**  | **2017 (Audited) (Rp)** |
| **3.** | **Tanah**  | **2.837.179.000,-** | **2.837.179.000,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017 .

1. **Dasar Penilaian**
	1. Neraca Awal 2005 Rp 2.586.970.000
	2. Harga Perolehan 2006 sd 2018 Rp. 250.209.000

Pada Tahun 2018 tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada perkiraan Aset Tetap Tanah.

Daftar Tanah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 17.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2018 (Rp)**  | **2017 (Audited) (Rp)** |
| **4.** | **Peralatan & Mesin**  | **8.658.150.989,99** | **7.625.515.764,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017 .

1. **Dasar Penilaian**
	1. Neraca Awal 2005 Rp 401.160.000,-
	2. Harga Perolehan 2006 sd 2018 Rp. 8.256.990.990,-

Daftar Peralatan dan Mesin Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

1. **Mutasi Tambah Kurang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Peralatan & Mesin | 7.625.515.764,**-** | 1.687.121.401,- | 654.486.175,01 | 8.658.150.989,99 |
| Akm Peny Peralatan & Mesin | 4.820.530.821,40 | 2.052.071.625,05 | 656.266.175,01 | 6.216.336.271,44 |
| Nilai Buku |  |  |  | **2.441.814.718,55** |
|  | **Saldo Audited 2017** |  | **7.625.515.764,-** |
|  | **Mutasi Tambah** |  |  |
|  | - Belanja Modal tahun 2018 |  | 358.550.000,- |
|  | - Mutasi antar SKPD |  | 1.328.571.401,- |
|  | **Total Mutasi Tambah** |  | **1.687.121.401,-** |
|  |  |  |  |
|  | **Mutasi Kurang** |  |  |
|  | **-**Koreksi Nilai Saldo Awal-Reklas Ke Aset Tak Bermanfaat-Reklas ke Aset Dipakai Pihak Lain **Total Mutasi Kurang**  |  | 0.01,-253.326.175,-401.160.000,-**654.486.175,01,-** |
|  | **Saldo per 31 Des 2018** |  | **8.658.150.989,99** |

**Penjelasan Mutasi Tambah:**

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.358.550.000,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
2. Mutasi antar SKPD senilai Rp 1.328.871.401,- adalah mutasi dari Dinas Pariwisata Berita Acara Serah Terima Asset Tetap Dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada Kepala Badan Penghubung Prov.Sumatera Barat No.030/221,A/BAST/BAPPMD-III/2018 tgl 2 Januari 2018

**Penjelasan Mutasi Kurang:**

1. Koreksi Nilai Saldo Awal senilai Rp 0.01 berdasarkan Daftar Aset sesuai Aplikasi SIMBADA
2. Reklas ke Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp 253.326.175,- merupakan Aset yang telah diusulkan akan dihapuskan namun belum keluar Surat Keputusan Gubernurnya tentang Penghapusannya.
3. Reklas ke Aset Dipakai Pihak Lain senilai Rp 401.160.000 merupakan Aset Kendaraan Dinas Roda Empat Merk Toyota Camry Tahun 2005 . Kendaraan berada pada mantan Ketua DPRD Prov.Sumbar Yulteknil.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 17.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2018 (Rp)**  | **2017 (Audited) (Rp)** |
| **5.** | **Gedung & Bangunan** | **20.509.506.999,-** | **14.636.568.684,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Penghubung per 31 Desember 2018 dan 2017 .

1. **Dasar Penilaian**
	1. Neraca Awal 2005 Rp. 3.655.066.187,-
	2. Harga Perolehan 2006 sd 2018 Rp. 16.854.440.812,-

Daftar Peralatan dan Mesin Badan PenghubungProvinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

1. **Mutasi Tambah Kurang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Gedung & Bangunan | 14.636.568.684,- | 5.872.938.315,- | - | 20.509.506.999,- |
| Akm.Peny Gedung & Bangunan  | 3.237.784.403,01 | 431.324.148,77 | - | 4.180.296.510,83 |
| Nilai Buku |  |  |  |  **16.329.210.488,17** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Saldo Audited 2017** |  | **14.636.568.684,-** |
|  | **Mutasi Tambah** |  |  |
|  | Belanja Modal tahun 2018 |  | 218.314.885,- |
|  | Mutasi antar SKPD |  | 5.654.623.430,- |
|  | **Total Mutasi Tambah** |  | **5.872.938.315,-** |
|  |  |  |  |
|  | **Mutasi Kurang** |  |  |
|  | Reklasifikasi |  | - |
|  | **Total Mutasi Kurang** |  | **-** |
|  | **Total Mutasi** |  | **5.872.938.315,-** |
|  | **Saldo per 31 Des 2018** |  | **20.509.506.999,-** |

**Penjelasan Mutasi Tambah**

1. Mutasi Tambah Gedung & Bangunan adalah Mutasi Antar SKPD senilai Rp.5.654.623.430,- dari Dinas Pariwisata Berita Acara Serah Terima Asset Tetap Dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada Kepala Badan Penghubung Prov.Sumatera Barat No.030/221,A/BAST/BAPPMD-III/2018 tgl 2 Januari 2018
2. Mutasi Tambah Belanja Modal Tahun 2018 adalah Rehabilitasi Atap pada Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah.

Pada Tahun 2018 tidak terdapat Mutasi Kurang pada Aktiva Gedung & Bangunan.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran 17.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2018 (Rp)**  | **2017 (Audited) (Rp)** |
| **6.** | **Asset Tetap Lainnya** | **550.471.800,-** | **34.186.090,-** |
|  | 1. **Dasar Penilaian**

Neraca Awal 2005Harga Perolehan 2006 sd 20171. **Mutasi Tambah Kurang**
 | 0,-34.186.090,- |  |
| Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
| Asset Tetap Lainnya  | 34.186.090,- | 572.530.010,- |  56.244.3000,- | 550.471.800,- |
| Akm. Penyusutan | - | - | - | - |
| Nilai Buku |  |  |  |  **550.471.800,-** |
|  | **Saldo Audited 2017** |  | **34.186.090,-** |
|  | **Mutasi Tambah** |  |  |
|  | Belanja Modal tahun 2018 |  | ,- |
|  | Mutasi antar SKPD |  | 572.530.010,- |
|  | **Total Mutasi Tambah** |  | **572.530.010,-** |
|  |  |  |  |
|  | **Mutasi Kurang** |  |  |
|  | Reklasifikasi |  | 56.244.300,- |
|  | **Total Mutasi Kurang** |  | **56.244.300,-** |
|  | **Total Mutasi** |  | **516.285.710,-** |
|  | **Saldo per 31 Des 2018** |  | **550.471.800,-** |

**Penjelasan Mutasi Tambah**

* + - * 1. Mutasi Tambah Gedung & Bangunan adalah Mutasi Antar SKPD senilai Rp. 572.530.010,- dari Dinas Pariwisata.Berita Acara Serah Terima Asset Tetap Dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada Kepala Badan Penghubung Prov.Sumatera Barat No.030/221,A/BAST/BAPPMD-III/2018 tgl 2 Januari 2018.

**Penjelasan Mutasi Kurang**

1. Reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp.56.244.300,-

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Penghubung per 31 Desember 2018 dan 2017 .

Daftar Aset Tetap Lainnya Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dalam bentuk KIB D, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2018 (Rp)**  | **2017 (Audited) (Rp)** |
| **7.** | **Akumulasi Penyusutan** | **(10.396.632.782,27)** | **(8.058.315.224,41)** |

 Jumlah tersebut merupakan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 yang terdiri dari:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2018 (Rp)**  | **2017Restatement (Rp)**  |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin | (6.216.336.271,44) | (4.820.530.821,40) |
| Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan | (4.180.296.510,83) | (3.237.784.403,01) |

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2018 dan 2017.Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Akm.Peralatan dan Mesin | 4.820.530.821,40 | 2.052.071.625,05 | 656.266.175,01 | 6.216.336.271,44 |
| Akm.Gedung dan Bangunan | 3.237.784.403,01 | 942.512.107,82 | 431.324.148,77 | 4.180.296.510,83 |
| **Jumlah Akm Penyusutan** | **10.396.632.782,27** |  |  | **10.396.632.782,27** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Peralatan & Mesin** | **Gedung& Bangunan** | **Jln Irigasi & Jaringan** | **Aset Tetap Lainnya** |
| **SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2017 (NERACA RESTATEMENT)** | **4.820.530.821,40** | **3.237.784.403,01** | - | - |
| * JUMLAH KOREKSI TAMBAH:
 |  |  |  |  |
| * + Kurang Catat/tdk tercatat
 |  |  |  |  |
| * + Hibah dr Pihak Ketiga
 |  |  |  |  |
| * + Mutasi antar SKPD
 | 939.757.415,25 | 511.187.959,- |  |  |
| * + Reklasifikasi
 |  |  |  |  |
| * + Koreksi + Saldo Awal
 |  | 0,05 |  |  |
| * JUMLAH KOREKSI KURANG:
 |  |  |  |  |
| * + Double Record
 |  |  |  |  |
| * + Hibah
 |  |  |  |  |
| * + Penghapusan
 |  |  |  |  |
| * + Mutasi antar SKPD
 |  |  |  |  |
| * + Reklasifikasi
 | 649.666.925,- | - |  |  |
| * + Koreksi - Saldo Awal
 | 6.599.250,01 |  |  |  |
| * **BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2018**
 | **1.112.314.209,80** | **431.324.148,77** |  |  |
| * **SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2018**
 | **6.216.336.271,44** | **4.180.296.510,83** | **-** | **-** |

**Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan** :

**Penjelasan Mutasi Tambah**

1. Mutasi antar SKPD untuk Peralatan dan Mesin senilai Rp.939.757.415,25,- dan dan Gedung dan Bangunan senilai Rp.511.187.959,-yaitu dariDinas Pariwisata sesuai Berita Acara Serah Terima Asset Tetap Dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada Kepala Badan Penghubung Prov.Sumatera Barat No.030/221,A/BAST/BAPPMD-III/2018 tgl 2 Januari 2018
2. Beban Penyusutan Tahun 2018 untuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp.**1.112.314.209,80** dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.**431.324.148,77**.
3. Koreksi saldo awal Akm. Penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp.0,05

**Penjelasan Mutasi Kurang**

1. Mutasi Kurang pada Akumulasi Peralatan Mesin yaitu senilai Rp.253.326.175,- ke Aset Tak Bermanfaat dan senilai Rp. 401.160.000 ke Aset Dipakai Pihak Lain.

 Pada Tahun 2018 tidak terdapat mutasi kurang pada Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan.

Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan ini dapat dilihat pada Lampiran 30.

 **Aset Lainnya**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2018 (Rp)**  | **2017 (Audited) (Rp)** |
| **8.** | **Aset Tidak Berwujud Lainnya**  | **102.100.000,00** | **102.100.000,00** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud Lainnya sampai dengan posisi 31 Desember 2018 dan 2017

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 102.100.000,- dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017.

|  |  |
| --- | --- |
| **Saldo Audited 2017** | **102.100.000,00** |
| Mutasi Tambah | 0,00 |
| Mutasi Kurang |  0,00 |
| **Total Mutasi** | **0,00** |
| **Saldo per 31 Des 2018** | **102.100.000,00** |

Pada tahun 2018 tidak terdapat mutasi tambah kurang pada perkiraan Aset Tidak Berwujud Lainnya

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2018 (Rp)**  | **2017 (Audited) (Rp)** |
| **9.** | **Akumulasi Amortisasi** | **94.100.000,00** | **80.500.000,00** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya sampai dengan posisi 31 Desember 2018 dan 2017.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi Amortisasi tersebut. :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Akm. Amortisasi Aset Tdk Berwujud | 80.500.000,- | 13.600.000,- | - | 94.100.000,- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Uraian** | **Nilai** |
| **SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2017 (NERACA )** | **80.500.000,-** |
| * JUMLAH KOREKSI TAMBAH:
 | 0,00 |
| * + Kurang Catat/tdk tercatat
 |  |
| * + Hibah dr Pihak Ketiga
 |  |
| * + Mutasi antar SKPD
 |  |
| * + Reklasifikasi
 |  |
| * + Koreksi + Saldo Awal
 |  |
| * JUMLAH KOREKSI KURANG:
 | 0,00 |
| * + Double Record
 |  |
| * + Hibah
 |  |
| * + Penghapusan
 |  |
| * + Mutasi antar SKPD
 |  |
| * + Reklasifikasi
 |  |
| * + Koreksi - Saldo Awal
 |  |
| * BEBAN AMORTISASI TAHUN 2018
 | 13.600.000,- |
| * **SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DES 18**
 | **94.100.000,-** |

**Penjelasan Mutasi tambah dan Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan** :

Mutasi tambah pada tahun 2018 berupa beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2018 senilai Rp.13.600.000,- dan tidak ada mutasi kurang beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2018.

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 18.

**Aset Lain-lain**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2018 (Rp)**  | **2017 (Audited) (Rp)** |
| **10.** | **Aset Tidak Bermanfaat** | **309.570.475,-** | **0,00** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain Aset Tidak bermanfaat yang sampai dengan posisi 31 Desember 2018 dan 2017.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang asset tidak bermanfaat tersebut. :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
|  Aset Tidak Bermanfaat | - | 309.570.475,- | - | 309.570.475,- |
| Akm. Penyusutan Aset Tidak bermanfaat | - | 250.719.875,- | - | 250.719.875,- |
| Nilai Buku | - | 58.850.600,- | - | 58.850.600,- |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saldo Audited 2017** | **0,00** |
| Mutasi Tambah | 309.570.475,00 |
| Mutasi Kurang |  0,00 |
| **Total Mutasi** | **0,00** |
| **Saldo per 31 Des 2018** | **309.570.475,00** |

**Penjelasan Mutasi Tambah**

Pada Tahun 2018 terdapat Mutasi Tambah pada akun Aset Tidak Bermanfaaat yang merupakan Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin senilai Rp.253.326.175 karena asset sudah dalam kondisi rusak berat hasil inventarisasi sesuai Berita Acara Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018 Nomor 030/631/BPHB/BA/XI-2018. Selain itujuga terdapat Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap Lainnya senilai Rp.56.244.300,- berupa Buku-Buku serta Pelaminan Adat yang juga sudah dalam kondisi rusak berat hasil inventarisasi.

**Penjelasan Mutasi kurang**

Tidak Terdapat Mutasi Kurang pada akun Aset Tidak Bermanfaat Tahun 2018.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2018 (Rp)**  | **2017 (Audited) (Rp)** |
| **11.** | **Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat** | **250.719.875,-** | **0,00** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat sampai dengan posisi 31 Desember 2018 dan 2017.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan asset tidak bermanfaat tersebut. :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
|  Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat | - | 250.719.875,- | - | 250.719.875,- |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saldo Audited 2017** | **0,00** |
| Mutasi Tambah | 250.719.875,00 |
| Mutasi Kurang |  0,00 |
| **Total Mutasi** | **0,00** |
| **Saldo per 31 Des 2018** | **250.719.875,00** |

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **Harga Perolehan** | **Akm Penyusutan** | **Nilai Buku** |
| **Saldo Audited 2017** | **0** | **0** | **0,00** |
| **Mutasi Tambah** |  |  |  |
| Mutasi antar SKPD |  |  |  |
| Reklasifikasi  | 309.570.475,- | (250.719.875,-) | 58.850.600,- |
| Koreksi Akm Penyusutan |  |  |  |
| Beban Penyusutan 2017 |  |  |  |
| **Total Mutasi Tambah** | **309.570.475,-** | **(250.719.875,-)** | **58.850.600,-** |
| **Mutasi Kurang** |  |  |  |
| Penghapusan | - | - | - |
| Mutasi antar SKPD |  |  |  |
| Reklasifikasi |  |  |  |
| Koreksi Akm Penyusutan |  |  |  |
| **Total Mutasi Kurang** | **-** | **-** | **-** |
| **Total Mutasi** | **309.570.475,-** | **(250.719.875,-)** | **58.850.600,-** |
| **Saldo per 31 Des 2018** | **309.570.475,-** | **(250.719.875,-)** | **58.850.600,-** |

**Penjelasan Mutasi Tambah**

Pada Tahun 2018 terdapat Mutasi Tambah Akumulasi PenyusutanAset Tidak Bermanfaaat yang merupakan Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin senilai Rp.248.506.925 karena asset sudah dalam kondisi rusak berat hasil inventarisasi sesuai Berita Acara Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018 Nomor 030/631/BPHB/BA/XI-2018. Dan beban penyusutan 2018 sebesar Rp.2.212.950,-

**Penjelasan Mutasi kurang**

Tidak Terdapat Mutasi Kurang pada akun Aset Tidak Bermanfaat Tahun 2018.

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Bermanfaat dapat dilihat pada Lampiran 18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2018 (Rp)**  | **2017 (Audited) (Rp)** |
| **12.** | **Aset Dipakai Pihak Lain** | **401.160.000,-** | **0,00** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Dipakai Pihak Lain sampai dengan posisi 31 Desember 2018 dan 2017.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang asset dipakai pihak lain tersebut. :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Aset Dipakai Pihak Lain | - | 401.160.000,- | - | 401.160.000,- |
|  Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat | - | 401.160.000,- | - | 401.160.000,- |
| Nilai Buku | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saldo Audited 2017** | **0,00** |
| Mutasi Tambah | 401.160.000,00 |
| Mutasi Kurang |  0,00 |
| **Total Mutasi** | **0,00** |
| **Saldo per 31 Des 2018** | **401.160.000,00** |

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **Harga Perolehan** | **Akm Penyusutan** | **Nilai Buku** |
| **Saldo Audited 2017** | **0** | **0** | **0,00** |
| **Mutasi Tambah** |  |  |  |
| Mutasi antar SKPD |  |  |  |
| Reklasifikasi  | 401.160.000,- | (401.160.000,-) | 0,- |
| Koreksi Akm Penyusutan |  |  |  |
| Beban Penyusutan 2017 |  |  |  |
| **Total Mutasi Tambah** | **401.160.000,-** | **(401.160.000,-)** | **0,-** |
| **Mutasi Kurang** |  |  |  |
| Penghapusan | - | - | - |
| Mutasi antar SKPD |  |  |  |
| Reklasifikasi |  |  |  |
| Koreksi Akm Penyusutan |  |  |  |
| **Total Mutasi Kurang** | **-** | **-** | **-** |
| **Total Mutasi** | **401.160.000,-** | **(401.160.000,-)** | **0,-** |
| **Saldo per 31 Des 2018** | **401.160.000,-** | **(401.160.000,-)** | **0,-** |

**Penjelasan Mutasi Tambah**

Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Dipakai Pihak Lain senilai Rp 401.160.000,- yang adalahAset Kendaraan Dinas Roda Empat Merk Toyota Camry Tahun 2005yang dipakai oleh pihak lain.

Dimana nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya sama sebesar Rp.401.160.000,-

**Kewajiban**

**Kewajiban Jangka Pendek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2018 (Rp)**  | **2017 (Audited) (Rp)** |
| **11.** | **Utang Belanja** | **443.763.599,-** | **230.580.498,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2018 dan 2017. Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

* **Utang Belanja Pegawai Rp426.527.866,-**

Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebesar Rp 207.830.810,-dan bulan Desember sebesar Rp 218.697.056,- . Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No.65 Tahun 2018 tentangPerubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pasal12 yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| **Utang Belanja Pegawai** | **216.900.554,-** | **426.527.866,-** | **216.900.554,-** | **426.527.866,-** |

*Penambahan sebesar*Rp. **426.527.866**,- merupakan Utang Belanja Pegawai untuk bulan November sebesar Rp 230.194.750dan bulan Desember sebesar Rp 230.194.750,- Tahun 2018dan akan dibayarkan pada bulan Januari dan Februari 2019.

*Pengurangan sebesar* Rp. **216.900.554**,- merupakan Utang Belanja Pegawai Tahun lalu untuk bulan November dan Desember Tahun 2017 dan telah dibayarkan pada bulan Januari dan Februari Tahun 2018.

* **Utang Belanja Barang dan Jasa Rp 17.235.733,-**

Yaitu utang belanja telpon senilai Rp.949.549,- belanja listrik senilai Rp13.433.539,- BelanjaAir senilai Rp.83.145,- Belanja internet senilai Rp2.769.500,- yang merupakan pemakaian bulan Desember 2018 yang akan dibayarkan bulan Januari 2019.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| **Utang Belanja Barang dan Jasa** | **13.679.944,-** | **17.235.733,-** | **13.679.944,-** | **17.235.733,-** |

*Penambahan sebesar* Rp.17.235.733,- merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa yang berupa Utang Listrik, Air, dan telepon bulan Desember 2018 yang akan dibayar pada tahun 2019.

*Pengurangan sebesar*Rp. 13.679.944,- merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Lalu yang berupa Utang Listrik, Air, dan Telepon bulan Desember 2017yang telah dibayarkan pada tahun 2018.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

**Ekuitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2018 (Rp)**  | **2017(Audited) (Rp)** |
| **12.** | **Ekuitas** | **21.837.396.152,72** | **16.875.420.615,59** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017 . Ekuitas ini terdiri dari:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Ekuitas | Rp. | **22.986.799.332,29** |
| - | Surplus/Defisit LO | Rp. | (13.635.173.787,57) |
| - | Perubahan SAL | Rp. | 12.485.770.608,- |
| - | Surplus/Defisit LRA | Rp. | (12.485.770.608,-) |
| - | RK/PPKD | Rp. | 12.485.770.608,- |
|  | **Jumlah Ekuitas** | **Rp.** | **21.837.396.152,72** |

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

* 1. **Penjelasan Pos Pos Laporan Operasional**

**5.3.1 Pendapatan - LO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2018** | **2017** |
| **Pendapatan Retribusi - LO** | **238.380.000,-** | **-** |

Jumlah tersebut merupakan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan-LO Tahun 2018 dan Tahun 2017.Semua penerimaan tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2018.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi- LRA dengan Pendapatan Retribusi-LO dapat dijelaskan sbb:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Belanja Pegawai LRA** | **Beban Pegawai LO** | **Selisih +/-** |
| **Pendapatan Retribusi** Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan | 238.380.000,- | 238.380.000,- | - |

Tidak ada perbedaan realisasi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO.

* + 1. **Beban**

**Beban Operasi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2018** | **2017** |
| **1. Beban Pegawai** | **3.590.634.154,-** | **3.183.756.525,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2018 dan Tahun 2017. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO yaitu :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi – LO | 1.608.712.500,- | 1.623.902.300,- |
| - | Tunjangan Keluarga-LO | 128.141.496,- | 114.229.146,- |
| - | Tunjangan Jabatan-LO | 45.180.000,- | 44.460.000,- |
| - | Tunjangan Fungsional Umum-LO | 78.700.000,- | 75.070.000,- |
| - | Tunjangan Beras-LO | 78.648.120,- | 77.561.820,- |
| - | Tunjangan PPh/Tunjangan khusus-LO | 1.479.968,- | 499.171,- |
| - | Pembuatan Gaji-LO | 23.712,- | 26.482,- |
| - | Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO | 9.897.480,- | - |
| - | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja- LO | 3.299.071,- | - |
| - | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja-LO | 1.636.552.107,- | 1.248.007.606,- |
|  | **J U M L A H** | **3.624.495.788,-** | **3.183.756.525,-** |

Saldo/ jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah belanja pegawai netto untuk Tahun 2018. Tahun ini tidak terdapat pengembalian Belanja Pegawai.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Belanja Pegawai LRA** | **Beban Pegawai LO** | **Selisih +/-** |
| Gaji Pokok PNS/Uang Representasi – LO | 1.608.712.500,- | 1.608.712.500,- | - |
| Tunjangan Keluarga-LO | 128.141.496,- | 128.141.496,- | - |
| Tunjangan Jabatan-LO | 45.180.000,- | 45.180.000,- | - |
| Tunjangan Fungsional Umum-LO | 78.700.000,- | 78.700.000,- | - |
| Tunjangan Beras-LO | 78.648.120,- | 78.648.120,- | - |
| Tunjangan PPh/Tunjangan khusus-LO | 1.479.968,- | 1.479.968,- | - |
| Pembuatan Gaji-LO | 23.712,- | 23.712,- | - |
| Iuran Jaminan Kematian –LO | 9.897.180,- | 9.897.180,- |  |
| Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja-LO | 3.299.071,- | 3.299.071,- |  |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja-LO | 1.426.924.795,- | 1.670.413.741,- |  (243.488.946) |

**Penjelasan selisih:**

* + - * 1. Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan November 2018 sebesar Rp. 207.830.810,- dan bulan Desember 2018 sebesar Rp. 218.697.056,- berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan November dan Desember 2018 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada bulan Januari dan Februari 2019 sehingga dicatat sebagai Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2018.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Penyesuaian Smtr 1** | **Penyesuaian Smtr 2** | **Jumlah** |
|  | **Debet** | **Kredit** | **Debet** | **Kredit** | **Debet** | **Kredit** |
| Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja |  | 216.900.554,- |  |  209.627.312,- |  209.627.312,- | 216.900.554,- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2018** | **2017** |
| **2. Beban Barang dan Jasa** | **8.723.468.325,-** | **5.577.614.697,67** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan JasaTahun 2018 dan Tahun 2017. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2018 (Rp)**  | **2017 (Rp)**  |
|   | Beban Bahan Pakai Habis | 256.037.563,- | 175.741.251,00 |
|   | Beban Jasa Kantor  | 456.860.013,- | 316.971.136,00 |
|   | Beban Premi Asuransi | 112.246.735,- | 85.551.278,00 |
|   | Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 190.333.900,- | 147.496.656,00 |
|   | Beban Cetak & Penggandaan | 110.093.430,- | 103.058.400,00 |
|   | Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.426.851.775,- | 1.303.531.616,67 |
|   | Beban Sewa Sarana Mobilitas | 120.800.000,- | 58.200.000,00 |
|   | Beban Sewa Perlengkapan Peralatan Kantor  | 91.050.000,- | 3.000.000,00 |
|   | Beban Makanan & Minuman | 523.502.434,- | 280.174.630,00 |
|   | Beban Pakaian Dinas & Atributnya | 47.586.000,- | 20.340.000,00 |
|   | Beban Pakaian Kerja | 17.674.000,- | 16.320.000,00 |
|  | Beban Pakaian Adat Daerah | 49.940.000,- | 38.500.000,00 |
|   | Beban Perjalanan Dinas | 2.082.511.327,- | 2.078.892.637,00 |
|   | Beban Pemeliharaan | 76.709.000,- | 111.101.570,00 |
|   | Honorarium PNS | 159.950.000,- | 123.650.000,00 |
|   | Honorarium Non PNS | 831.009.238,- | 596.428.723,00 |
|   | Beban Jasa Lembaga | 239.550.000,- | 118.656.800,00 |
|   | Uang Untuk Diberikan pada Pihak Ketiga | 20.000.000,- | - |
|  | Beban Jasa Lainnya  | 1.910.762.810,- | - |
|   | **Total** | **8.723.468.325,-** | **5.577.614.697,67** |

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto. Pada Tahun 2018 terdapat pengembalian beban barang jasa senilai Rp.**5.415.243** ,- yang terdiri dari:

* + - Perjalanan Dinas Luar Daerah Keg Rapat Rapat Koordinasi ke Luar dan dalam daerah an. Febrina Marlisa Rp. 4.682.243,00
		- Biaya BBM Keg. Ceramah Agama Rp 30.000,-
		- Biaya Makan Minum Rapat Kegiatan Ceramah Agama Rp 353.000
		- Biaya SPPD Dalam daerah Kegiatan pengelolaan Asrama Mahasiwa Minang di Bogor dan Yogyakarta Rp 350.000

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Uraian** | **Beban LRA** | **Beban LO** | **Selisih +/-** |
|  | Beban Bahan Pakai Habis | 280.138.688 | 256.037.563 | 24.101.125 |
|  | Beban Jasa Kantor | 453.304.224 | 456.860.013 | (3.555.789) |
|  | Beban Cetak & Penggandaan | 132.358.650 | 110.093.430 | 22.265.220 |

Penjelasan selisih:

* + - Penyesuaian persediaan pada Semester 1 dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Semester 1 dan Semester 2 yaitu :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Penyesuaian Smtr 1** | **Penyesuaian Smtr 2** | **Jumlah** |
|  | **Debet** | **Kredit** | **Debet** | **Kredit** | **Debet** | **Kredit** |
| Belanja Bahan Pakai Habis | 121.687 | 17.677.134 | 13.787 | 6.559.465 | 135.474 | 24.236.599 |
| Bahan Dokumentasi/cetakan | 859.900 | - | - | 23.125.120 | 859.900 | 23.125.120 |

* + - Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2018 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2018.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Penyesuaian Smtr 1** | **Penyesuaian Smtr 2** | **Jumlah** |
|  | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| * Belanja Jasa Kantor
 | - | 13.679.944 | 17.235.733 | - | 17.235.733 | 13.679.944 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2018** | **2017** |
| **3. Beban Penyusutan dan Amortisasi** | **1.559.451.308,57** | **1.305.063.801,56** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban PenyusutanTahun 2018 dan Tahun 2017. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2018** | **2017** |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin |  1.112.314.209,80 | 942.709.321,30 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 431.324.148,77 | 348.754.480,26 |
| Beban Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat | 2.212.950,00 | - |
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 |

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2017tanggal 31 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 30.

**5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2018** | **2017** |
| **Ekuitas** | **21.837.396.152,72** | **16.875.420.615,59** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekuitas Awal** | **16.875.420.615,59** | **17.461.442.770,82** |
| **Koreksi Ekuitas** | **-** | **-** |
| **Surplus/Defisit-LO** | **(13.635.173.787,57)** | **(10.073.405.094,23)** |
| **RK PPKD** | **12.485.770.608,-** | **7.993.439.050,-** |
| **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar** | **6.111.378.716,70** | ***1.486.973.819,-*** |
| **Ekuitas Akhir** | **21.837.396.152,72** | **16.868.450.545,59** |

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar 16.875.420.615,59,-adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2017.
2. Koreksi Ekuitas.
3. Surplus/Defisit LO sebesar (13.635.173.787,57)adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2018
4. RK PPKD sebesar Rp 12.485.770.608,- adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2018 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
5. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp.6.111.378.716,70, yaitu :
6. Koreksi Tambah Aset tetap sebesar Rp.6.104.779.466,75
7. Koreksi Tambah Akm. Penyusutan Peralatan dan mesin sebesar Rp.6.599.250,-
8. Koreksi Kurang Akm. Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp.0,05)
9. Ekuitas Akhir sebesar Rp **21.837.396.152,72**adalah saldo Ekuitas Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018.
	1. **Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.**

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2017 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Pendapatan/ Belanja** | **LRA** | **LO** | **Selisih** |
| **Pendapatan Daerah** | **238.380.000,00** | **238.380.000,00** | **-** |
| * Pendapatan Pajak
 | - | - | - |
| * Pendapatan Retribusi
 | 238.380.000,00 | 238.380.000,00 | - |
| * Lain-lain PAD Yg Sah
 | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan | - | - | - |
| **Belanja/Beban** | **12.147.285.723,00** | **10.073.405.094,23** |  **1.760.129.698,57**  |
| * Belanja Pegawai
 | 3.381.006.842,00 | 3.624.495.788,00 | (243.488.946,00) |
| * Belanja Brg & Jasa
 | 8.766.278.881,00 | 8.723.468.325,00 | 42.810.556,00 |
| * Belanja Modal
 | 576.864.885,00 | - | 576.864.885,- |
| * Beban Penyusutan &Amortisasi
 | - | 1.559.451.308,57 | (1.559.451.308,57) |
| * Beban Penyisihan Piutang
 | - | - |  |
| **Jumlah Belanja/Beban** | **12.724.150.608,-** | **13.907.415.421,57** | **(1.183.264.803,57)** |

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

Penjelasan atas Informasi-Informasi

Non Keuangan

* 1. **Dasar Hukum Pembentukan**

Landasan Hukum yang menjadi dasar penulisan Laporan KeuanganBadan Penghubung adalah :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah yang menyebutkan Badan Penghubung merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat. Badan Penghubung mempunyai tugas menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana disebut diatas Badan Penghubung mempunyai fungsi :
3. Perumusan kebijakan teknis bidang penghubung;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penghubung;
5. Pembinaan dan fasilitasi bidang penghubung lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Pelaksanaan tugas di bidang humas protokol dan pelayanan; hubungan antar lembaga; promosi dan investasi;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penghubung; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penghubung Tahun 2018
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Penghubung Tahun 2018.
	1. **Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Penghubung Provinsi mempunyai fungsi yaitu;

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penghubung;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penghubung;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang penghubung lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan tugas di bidang humas protokol dan pelayanan; hubungan antar lembaga; promosi dan investasi;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penghubung; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	1. **Struktur Organisasi , Rincian Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pasal 2, Badan Penghubung termasuk Badan Daerah untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

* + - * 1. Tata Usaha;
				2. Seksi Humas Protokol dan Pelayanan;
				3. Seksi Hubungan Antar Lemabga;
				4. Seksi Promosi dan Investasi; dan
				5. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada tanggal 29 Desember 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat maka Unit Pelaksana Teknis Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah diintegrasikan sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Dengan dikeluarkannya Peraturan tersebut maka per Tahun 2018 Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah bergabung dengan Badan Penghubung.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat maka Tugas Kepala Badan, Subag TU dan Seksi-seksi adalah sebagai berikut:

1. **Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat**
2. Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Rincian tugas Kepala Badan adalah:
* Menyelenggarakan pengendalian dan pengkordinasian pelaksanaan tugas ketatausahaan, hubungan antar lembaga, promosi dan investasi, serta protocol dan pelayanan;
* Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan program kerja badan;
* Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan penyelenggaraan hubungan antar lembaga, promosi dan investasi serta protocol dan pelayanan;
* Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis hubungan antar lembaga, promosi dan investasi serta protocol dan pelayanan;
* Menyelenggarakan fasilitasi peran serta masyarakat asal Sumatera barat yang ada di Jakarta;
* Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta promosi pembangunan daerah;
* Menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD kantor;
* Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
* Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan badan;
* Menyelenggarakan koordinasi dengan pihak terkait;
* Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-314-2013 tanggal 5 April 2013 tentang Penambahan Tugas Khusus Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang berlaku mulai Januari 2013, menyatakan bahwa Kepala Badan Penghubung mempunyai penambahan tugas khusus yaitu :

1. Mendampingi Gubernur, wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah selama bertugas di Jakarta;
2. Mewakili Gubernur, wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah untuk menghadiri acara-acara yang ditugaskan khusus kepada Kepala Kantor Penghubung;
3. Membantu mengurus keperluan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pejabat Daerah Lainnya selama bertugas di Jakarta.
4. **Sub Bagian Tata Usaha**
5. Subag Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.
6. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
* Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
* Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
* Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan program;
* Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah;
2. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
3. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan tugas kantor;
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi ketatalaksanaan dan kepegawaian;
5. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan administrasi keuangan;
6. Melaksanakan pengelolaan urusan umum, aset dan perlengkapan;
7. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja/Rencana Kerja Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
8. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan dan Aset secara berkala dan tahunan.
9. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. **Seksi Protokol dan Pelayanan**
11. Seksi Protokol dan Pelayanan mempunyai tugas pelaksanaan menyiapkan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Protokol dan pelayanan;
12. Untuk menjalankan tugas Seksi Protokol dan Pelayanan mempunyai fungsi:
13. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program Protokol dan Pelayanan;
14. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi Protokol dan Pelayanan;
15. Rincian tugas Seksi Protokol dan Pelayanan:
16. Melaksanakan penyusunan program rencana kerja dan penyusunan bahan mekanisme operasional keprotokolan dan pelayanan;
17. Melaksanakan koordinasi dan pelayanan kinjungan bagi unsure pimpinan daerah ke pusat dan provinsi lainnya;
18. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
19. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Protokol dan Pelayanan;
20. Melaksanakan pelayanan kehumasan Pimpinan Daerah dan perangkatnya dalam pelaksanaan tugas di luar Provinsi Sumatera Barat;
21. Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
22. **Seksi Hubungan Antar Lembaga**
23. Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang hubungan antar lembaga.
24. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:
25. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program hubungan antar lembaga;
26. Pelaksanaan pelayanan administrasi, koordinasi, harmonisasi dan fasilitasi hubungan antar lembaga.
27. Rincian tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga:
28. Melaksanakan penyusunan program kerja dan bahan kebijakan teknis hubungan antar lembaga pemerintah dan swasta;
29. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peran serta lembaga/non lembaga, masyarakat, dan swasta dalam menunjang pembangunan;
30. Melaksanakan fasilitasi dan mediasi hubungan dengan lembaga/pemerintahan luar negeri dalam manajemen kepemerintahan dan pembangunan;
31. Melaksanakan harmonisasi dalam penguatan peranan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya dan Pemerintah kabupaten/Kota;
32. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga;
33. Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
34. **Seksi Promosi dan Investasi**
	* + 1. Seksi Promosi dan Investasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan Promosi dan Investasi.
			2. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Promosi dan Investasi mempunyai fungsi:
35. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program Seksi Promosi dan Investasi;
36. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi pelaksanaan promosi dan investasi.
	* + 1. Rincian Tugas Seksi Promosi dan Investasi :
37. Menyusun program kerja dan bahan kebijakan Seksi Promosi dan Investasi;
38. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam bidang promosi daerah di Jakarta dan di luar Sumatera Barat;
39. Melaksanakan persiapan dan fasilitasi dalam upaya pengembangan investasi daerah dengan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
40. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi sebagai bahan promosi daerah pada tingkat nasional dan internasional;
41. Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Penghubung :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGHUBUNG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Kepala**  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Andre Setiawan,SSTP,MPA** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Pembina/ NIP.19810920 199912 1001** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   | **Kasubag Tata Usaha** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   | **Dona Elfira Amelia,S.STP, M.Si** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   | **Penata Tk.I/NIP 19800121 199912 2 001** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **Kepala Seksi Promosi & Investasi** |  | **Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga** |  | **Kepala Seksi Protokol & Pelayanan** |
| **Desramadanus, S.Sos** |  | **Virse Dwi Rozanita,SH,MM** |  | **Erwin Saragosa S.Sos** |
| **Penata Tk.I/****NIP 196812225 199103 1 003** |  | **Pembina Tk.I/****NIP 19670905 199003 2 002** |  | **Penata Tk.I/****NIP 19650814 198602 1002** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Sumber Daya Aparatur Badan Penghubung**

Personil Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta secara keseluruhan berdasarkan kondisi bulan Desember 2018 berjumlah 56 orang yang terdiri dari:

1. PNS Tetap : 55 orang
2. PTT : 1 orang

 Jumlah : 56 orang

Personil tersebut dapat juga dikelompokkan sebagai berikut:

Berdasarkan Golongan, terdiri dari:

* Pegawai golongan IV : 6 orang
* Pegawai golongan III : 30 orang
* Pegawai golongan II : 12 orang
* Pegawai golongan I : 5orang
* PTT : 1 orang

Jumlah : 56 orang

Berdasarkan Jenis Kelamin :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Kelamin** | **Jumlah** |
| 1. | Laki-laki | 29 orang |
| 2. | Perempuan | 27 orang |
|   | **Total** | **56 orang** |

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tingkat Pendidikan** | **Jumlah** |
| 1. | Pasca Sarjana | 9 orang |
| 2. | Sarjana (Strata 1) | 22 orang |
| 3. | Sarjana Muda  | 2 orang |
| 4. | SLTA | 10orang |
| 5. | SLTP | 5 orang |
| 6. | SD | 4 orang |
|   | ***Jumlah***  | **56orang** |

* 1. **Visi Dan Misi**
		1. **Visi**

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah:

**“Badan Penghubung sebagai Duta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang Profesional”**

* + 1. **Misi**

Misi adalah sesuatu yang barus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Sedangkan misi yang diemban oleh Badan Penghubung dalam pencapaian visi tersebut diatas, adalah:

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan public;

Meningkatkan hubungan dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah;

Meningkatkan Promosi, Publikasi dan informasi mengenai potensi daerah Sumatera Barat;

Meningkatkan peran serta masyarakat & perantau Minang dalam Pembangunan.

* 1. **Rencana Strategis**

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Adapun tujuan Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta Tahun 2016 -2021, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelancaran dan ketepatan pengurusan kepentingan daerah dengan pemerintah pusat , perwakilan asing dan Lembaga Non Pemerintah;
2. Mewujudkan Sumatera Barat sebagai first destination dalam meningkatkan kunjungan wisata dan kerjasama daerah melalui promosi potensi daerah;
3. Mewujudkan sinergisitas dan peran aktif perantau minang dalam pembangunan;
4. Mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Adapun Sasaran Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta Tahun 2016 – 2021, adalah sebagai berikut :

1. Terfasilitasinya kepentingan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah;
2. Terlaksananya promosi potensi daerah Sumatera Barat;
3. Meningkatnya sinergisitas dan koordinasi dengan Perantau Sumatera Barat;
4. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat bagi generasi muda perantau
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, transparan dan partisipatif
6. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada pimpinan daerah selama pelaksanaan tugas di luar Sumatera Barat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dihasilkan dari hasil analisis strategis yaitu S – O (*Strengths–Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi Badan Penghubung Provinsi Suamtara Barat yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mengintensifkan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian/ Lembaga/ Instansi, Paguyuban/ Organisasi Perantau Minang serta SKPD Provinsi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan kinerja dan pencapaian sasaran.
2. Aktualisasi kebijaksanaan pelayanan dalam menciptakan pelayanan prima;
3. Pemanfaatan asset (perantau minang) dalam percepatan pembangunan;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam menciptakan SDM yang berkualitas;
5. Revitalisasi penyajian data informasi pembangunan yang akuntabel dan akurat.
	1. **Kebijakan**

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan yang ditempuhadalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan Kementerian/ Lembaga/Instansi,serta masyarakat Minang di Jakarta;

2. Mengoptimalkan peran serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mensukseskan generasi muda (mahasiswa minang di perantauan);

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur;

4. Meningkatkan kapasitas serta kualitas sarana dan prasarana dalam rangka penyebaran informasi Kantor Penghubung;

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan fisik asrama mahasiswa;

6. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pimpinan;

7. Meningkatkan koordinasi peran serta masyarakat minang di perantauan.

* 1. **Program**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Sumatera Barat 2016 -2021.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra SKPD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada intinya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam lima (5) tahun mendatang.

Program Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang disusun untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah;
2. Program peningkatan pelayanan kedinasan;
3. Program peningkatan pelayanan publik;
4. Program pengembangan data dan informasi dan komunikasi.
	1. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat**

Untuk Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta maka perlu adanya Analisa Lingkungan Strategis. Analisa Lingkungan Strategis menjadi sangat penting untuk mengetahui tantangan dan peluang yang spesifik dan berbagai peringatan awal yang mengingatkan kita akan faktor atau unsur yang akan membahayakan dimasa depan.

Untuk menganalisa lingkungan strategis yang berpengaruh, dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu melalui *SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities*, *Threats ).*

Langkah awal dalam analisis *SWOT* adalah memahami apa saja faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang ada melalui proses identifikasi untuk memberikan gambaran faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat tercapainya tujuan.

* 1. **Analisa Lingkungan Internal (Kekuatan & Kelemahan)**
		+ 1. ***Strength***

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai tujuannya. Kekuatan-kekuatan yang dimiliki Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta yaitu :

1. Kewenangan sebagai “duta” Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta.
2. Dukungan Sumber daya yang memadai (sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, dll).
3. ***Weaknesses* ( Kelemahan)**

Kelemahan adalah situasi kekurang mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat / gagal mencapai sasarannya, selain memiliki kekuatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta, juga memiliki kelemahan yang dapat menjadi penghambat untuk mencapai tujuan kelemahan tersebut yaitu :

1. Status esselonering (esselon III) sehingga masih sulit dalam mengambil kebijakan yang bersifat teknis dan strategis.
2. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi yang masih belum tepat.
	1. **Analisa Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan)**
		* 1. ***Opportunity* (Peluang)**

Adanya perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan yang domestik, pluralistik dan desentralistik secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan perubahan-perubahan terjadi di pemerintah daerah maupun masyarakat. Keadaan tersebut memberikan peluang atau kesempatan bagi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta untuk mengembangkan segala upaya demi kemajuan daerah. Peluang atau kesempatan tersebut yaitu :

1. Kondisi letak (lokasi) yang strategis.
2. Pemanfaatan teknologi informasi (IPTEK) dalam pelaksanaan tupoksi.
3. Sumber daya Perantau Minang yang cukup besar.

**2). *Threats*( Ancaman)**

Selain peluang atau kesempatan yang ada, terdapat pula ancaman yang dapat menyebabkan adanya kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan. Adapun ancaman yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta yaitu :

Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Beberapa Kab/Kota juga memiliki perwakilan (kantor/perorangan) sehingga eksistensi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menjadi berkurang.

Dinamika Sosial dan Politik.

BAB VII

Penutup

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2018 yang penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat ini struktur penyusunannyadidasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana telah diubah Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, khususnya di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**Jakarta, Januari 2019**

**KEPALA BADANPENGHUBUNG**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**ANDRE SETIAWAN, S.STP, MPA**

**Pembina/NIP. 19810920 199912 1 001**